



Media: Harian Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 03 September 2026

Halaman: 5

» KAWASAN PEDESTRIAN

Ekonomi Pedagang Malioboro Harus Dijaga

JOGJA—Rencana penataan Malioboro menjadi kawasan *full pedestrian* diminta tidak mengurangi aktivitas ekonomi masyarakat yang selama ini bergantung pada kawasan tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY menilai penataan harus membuat Malioboro lebih nyaman bagi wisatawan sekaligus tetap menguntungkan pedagang dan pelaku usaha.

Ketua Komisi B DPRD DIY Andriana Wulandari mengatakan pada prinsipnya mendukung rencana penataan Malioboro menjadi kawasan pedestrian penuh. Sebagai ikon pariwisata Yogyakarta, Malioboro perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan sekaligus meningkatkan daya tarik kawasan.

"Namun, jangan sampai orientasi penataan ruang justru mengurangi fungsi Malioboro sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat," ujarnya, Rabu (2/9).

Andriana menyampaikan setidaknya ada empat hal yang perlu diperhatikan dalam penataan Malioboro. Pertama, terkait potensi peningkatan kunjungan wisatawan.

Menurutnya, kebijakan *kawasan full pedestrian* memiliki peluang besar untuk meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan dengan menghadirkan kawasan yang lebih nyaman untuk berjalan kaki, lebih tertib, rendah emisi, dan memiliki ruang publik yang bisa menjadi daya tarik tersendiri.

Namun, keberhasilan peningkatan kunjungan wisatawan, menurutnya, tidak cukup dilihat dari jumlah wisatawan yang datang. Hal yang lebih penting adalah wisatawan tinggal lebih lama, berbelanja, menikmati kuliner, menggunakan jasa wisata, serta memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha di Malioboro.

Selain itu pedagang harus menjadi perhatian utama. Jangan sampai setelah Malioboro menjadi kawasan pedestrian, kunjungan wisatawan tinggi, tetapi pedagang justru kehilangan pembeli karena akses menuju lokasi usaha menjadi semakin sulit.

Sebelum kebijakan *full pedestrian* diterapkan secara penuh, pemerintah harus memastikan beberapa hal, baik ketersediaan parkir, transportasi penghubung atau *shuttle*, akses bagi kelompok rentan, titik naik-turun penumpang, serta sistem bongkar muat barang bagi pedagang dan pelaku usaha," jelasnya.

Lebih lanjut, dia meminta pemerintah menyiapkan data awal terkait dengan omzet pedagang dan jumlah kunjungan sebagai acuan untuk mengukur dampak kebijakan *kawasan full pedestrian* setelah diterapkan, apakah memberikan dampak positif atau justru sebaliknya.

Selain itu, DPRD DIY juga mendorong adanya masa transisi dan evaluasi berkala. Menurutnya, kebijakan tidak boleh langsung ditetapkan secara permanen tanpa melihat respons masyarakat dan pelaku usaha.

"Kalau dalam pelaksanaan ternyata ada penurunan omzet atau kunjungan pada kelompok pedagang tertentu, pemerintah harus memiliki skema intervensi dan solusi," ungkapnya.

Ia juga menyebut indikator keberhasilan *full pedestrian* harus jelas. Keberhasilan penataan setidaknya harus dilihat dari lima aspek.

Kelima aspek tersebut meliputi meningkatnya jumlah dan lama tinggal wisatawan, meningkatnya transaksi dan omzet UMKM/pedagang, serta meningkatnya kenyamanan dan keamanan pejalan kaki.

Andriana meminta Penda DIY dan Pemkot Jogja duduk bersama untuk memastikan parkir, transportasi, rekayasa lalu lintas, akses pedagang, bongkar muat, dan konektivitas antar kawasan benar-benar siap sebelum *full pedestrian* diterapkan. (Anasatu Umari)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Oktober 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005